

ABSTRAK

“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM HAL PELANGGARAN PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

(Study Kasus Pada Astra Credit Companies Cabang Padang) “.

Oleh :

(Yuni Sandra, Bp:0821211031, Pasca Sarjana Universitas Andalas, 105 Halaman)

Penelitian ini dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama sekali dalam bidang ekonomi, khususnya masalah yang berhubungan dengan keterbatasan dana, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat memerlukan suatu lembaga pembiayaan, yang dalam Lembaga Pembiayaan ini menggunakan sistem pembayaran secara kredit atau angsuran. Lembaga pembiayaan ini bergerak dalam bidang penyediaan dana dan barang modal. Dalam lembaga pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan ini menawarkan berbagai macam bentuk penyediaan dana diantaranya sewa guna usaha (*leasing*), dalam penelitian ini penulis lebih menitik beratkan pembahasannya terhadap tindakan debitur yang seringkali mengalihkan, menyewakan atau menggadaikan kendaraan yang merupakan objek jaminan fidusia, sedangkan dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia diatur mengenai larangan untuk mengalihkan, menjual, menggadaikan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan tertulis kepada kreditor, dengan tindakan yang dilakukan oleh debitur tersebut maka debitur telah melanggar ketentuan pidana, yang dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda sebesar Rp 50.000.000. Selain dari pada pidana penjara dan denda, maka objek jaminan fidusia dapat dieksekusi, dalam pelaksanaan eksekusi berdasarkan Perkap No 8 Tahun 2011, maka pihak kepolisian akan mendampingi terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut. Dalam tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur pada ACC Padang sebagai kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia terkait dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, serta bagaimana pertanggung jawaban pidana dari debitur dalam perjanjian fidusia terkait dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan ACC Cabang Padang dalam perjanjian fidusia dalam mencegah terjadinya perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari pihak ACC. Metode penelitian ini adalah yuridis sosiologis, pendekatan secara yuridis dipergunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian jaminan fidusia dan penegakan hukum pidana, selain itu pendekatan secara sosiologis yaitu pendekatan yang bukan semata-mata peraturan perundang-undangan saja tetapi dilihat sebagai suatu kenyataan perilaku masyarakat. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Kesimpulan dari tulisan ini adalah Pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan leasing yang menyimpang dari isi perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Jo Pasal 372 KUHP apabila memenuhi unsur dalam Pasal KUHP dimaksud. Menurut praktiknya Perjanjian Pembiayaan Konsumen juga diikat dengan jaminan Fidusia. Selain itu pihak ACC juga melakukan berbagai langkah untuk mencegah pengalihan objek jaminan fidusia ini. Jika perbuatan pengalihan tersebut tetap terjadi maka pihak kreditor dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Pemegang fidusia memiliki hak *preferens* untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia.

ABSTRACT

"CRIMINAL LIABILITY IN THE EVENT OF VIOLATION OF ARTICLE 36 OF LAW NUMBER 42 OF 1999 CONCERNING fiduciary guarantee (Case Study At Astra Credit Companies Padang Branch) "

By :

(Yuni Sandra, Bp: 0821211031, Graduate University of Andalas, 105 pages)

This research in order to realize the welfare of the community in meeting their needs, particularly in the economic field, in particular the problems associated with limited funds, so as to meet the needs of the community need a financial institution, which in this Financing Institutions using a system of payment by credit or installment. These financial institutions engaged in the provision of funds and capital goods. In a financial institution regulated in Presidential Decree No. 9 of 2009 on Financing Agency. These financial institutions offer various forms of provision of funds include lease (leasing), in this study the author focuses pambahasannya against acts of debtors who often transfer, lease or mortgage vehicles that is the object of fiduciary guarantee, whereas in article 36 of Law No. 42 of 1999 on the fiduciary arranged on the prohibition to transfer, sell, pledge object fiduciary to another party without the knowledge of writing to creditors, with the action taken by the debtor that the debtor has violated the criminal provisions, which may be liable to imprisonment of 2 years or a fine of Rp 50,000,000. Other than imprisonment and fines, the fiduciary security object can be executed, the execution based on the Regulation No. 8 of 2011, then the police will accompany the implementation of the execution of the fiduciary guarantee. In this paper will discuss how the unlawful act committed by the debtor to the creditor in the ACC Padang as a fiduciary agreement related to Act No. 42 of 1999 on Fiduciary, and how the criminal liability of the debtor in fiduciary agreement related to Act Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary, and how the steps are carried out in the field Branch ACC fiduciary agreement in preventing the transfer of objects fiduciary deed without the written consent of the ACC. This research method adalh juridical sociological juridical approach used to analyze the various laws and regulations governing the agreement fiduciary security and criminal law enforcement, apart from that approach a sociological approach that is not solely the legislation alone but seen as a reality masyarakat. Data behavior derived from primary data and secondary data. The conclusion of this paper is the transfer of vehicles in future payments financing agreements leasing deviating from the content of the agreement can be qualified as criminal offenses under Article 36 of Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary And Jo Article 372 of the Criminal Code if they meet the elements of Article of the Criminal Code referred , According to the Consumer Financing Agreements practice also bound by fiduciary guarantee. In addition, the ACC also take various measures to prevent diversion of objects fiduciary ini. Jika the transfer deed persists then the creditors may make the execution of the fiduciary guarantee object. Preferens fiduciary holder has the right to take over the receivables settlement execution result object into Object Fiduciary.